

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PSAK No. 1 ABOUT THE PRESENTATION OF THE FINANCIAL REPORTS AT PUSKESMAS DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA III

Oleh: Muhammad Saleh Ash-shiddiq
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
msalehas@gmail.com
M.Djazari
Staf Pengajar Jurusan P. Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menganalisis Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen Laporan Keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK No.1. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik Miles & Huberman. Dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep perbandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian Laporan Keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan membandingkan tiga unsur, yaitu: PSAK No. 1. Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah menerapkan PSAK No.1 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No.1

Abstract

This research aims to study how the application of PSAK No. 1 about the presentation of the financial reports in Puskesmas Depok Sleman Yogyakarta III (Operational Reports, balance sheet, cash flow statement, and notes to financial reports). The data collection method used is the documentation. In this study researchers analyzed the financial report of Puskesmas Depok Sleman Yogyakarta III to observe how the systematic presentation of the elements of financial reports that are already in compliance with PSAK No. 1. Data analysis method used is descriptive method with engineering Miles & Huberman. In analyzing the data there are three stages that have to be done, namely (1) the reduction of data; (2) the exposure data; (3) the verification conclusion and withdrawal. This research begins with comparative analysis against the subject of the research with the concept of a comparison in terms of accounting policies as well as the presentation of the financial reports, then try to adjust and compare the three elements, namely: PSAK No. 1. About the presentation of the financial reports, Permendagri No. 61 in 2007 about the technical guidelines of the Agency's financial management public service areas, and financial reports health centers in Depok Sleman Yogyakarta III by 2015. Based on the results of the study it can be concluded that the

Depok Sleman Yogyakarta III Clinics have applied PSAK No. 1 in the presentation of the financial reports.

Keywords: financial reports, financial statement Presentation, PSAK No. 1

PENDAHULUAN

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan.

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu badan yang ikut serta dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun visi dan misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Menurut Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulan keadaan darurat kesehatan. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung

dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dalam mencapai tujuannya tersebut Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum yang menjadi ujung tombak dalam kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang kurang mampu mengeluhkan buruknya pelayanan dari rumah sakit tentang penanganan pasien, serta adanya masalah pengendalian biaya yang juga merupakan masalah kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak seperti mekanisme pasar, dan profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit tersebut.

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah juga tidak lepas dari perkembangan masalah tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan yang cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk

masyarakat, dengan meningkatnya layanan kesehatan kepada masyarakat berdampak pada besaran pengelolaan keuangannya. Untuk mewujudkan tujuan dari Kementerian Kesehatan maka diperlukan peningkatan pelayanan publik agar dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa:

"Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas."

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa "Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No.23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 69 ayat (7) UU No.1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

"BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat."

Oleh karena itu pemerintah memutuskan status rumah sakit milik pemerintah menjadi Badan Layanan Umum supaya pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat diberikan secara maksimal.

Adanya rumah sakit milik pemerintah ternyata masih perlu dibantu dengan adanya Puskesmas. Hal ini dikarenakan Puskesmas merupakan suatu

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan pusat kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja (Effendi, 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur. Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas.

Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui Puskesmas yakni terwujudnya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat, Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan

upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Mutu pelayanan merupakan faktor penting yang dapat membentuk kepercayaan pasien kepada Puskesmas sehingga tercapai loyalitas mereka sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Tuntutan terhadap mutu dari hari ke hari semakin tinggi. Mutu tersebut tidak hanya terdapat produk atau barang saja tetapi juga terhadap jasa yang ditawarkan oleh Puskesmas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan BLUD seperti yang tercantum pada Permendagri No.61 Tahun 2007 yaitu untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah. Standar yang dimaksud harus tercapai syarat seperti fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dapat diandalkan, dan tepat waktu. Adanya standar pelayanan minimal pada BLUD dapat membantu Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan sehingga dapat membantu pembangunan dalam bidang kesehatan. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa dengan mengubah status Puskesmas menjadi BLUD dapat meningkatkan pelayanan publik karena sudah adanya standar pelayanan minimal yang harus dimiliki oleh BLUD.

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah menurut Permendagri No.61 Tahun 2007 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Jadi, pada pelaksanaannya nanti BLUD diberikan keleluasaan dalam menjalankan BLUD sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Di samping itu, Puskesmas BLUD juga diberi kesempatan

untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Sesuai dengan Permendagri No.61 Tahun 2007 bahwa BLUD sebagai perangkat kerja pemerintah daerah mempunyai tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Segala kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum merupakan tanggungjawab Kepala Daerah. Dengan segala manfaat yang diperoleh dari merubah status menjadi BLUD.

Untuk mengubah status Puskesmas menjadi BLUD ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang dimaksud persyaratan substantif yaitu apabila tugas dan fungsi unit kerja tersebut bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik (*quasipublic goods*). Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, hal ini sudah termasuk bersifat operasional dalam *quasipublic goods*. Syarat berikutnya yaitu

syarat teknis. Yang dimaksud dengan syarat teknis yaitu kinerja pelayanan unit kerja tersebut tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya yang mendapat rekomendasi dari sekretaris daerah. Selain itu kinerja keuangan unit kerja tersebut juga harus dinilai sehat. karena dinilai layak dan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi adalah syarat administratif, di mana Puskesmas harus menyanggupi membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategi bisnis; standar pelayanan minimal; laporan keuangan pokok; dan laporan audit terakhir dimana dokumen-dokumen tersebut nantinya juga akan dibuat oleh Puskesmas setiap tahunnya. Dengan adanya Laporan Keuangan, dapat diketahui posisi Puskesmas terkini setelah menganalisis Laporan Keuangan yang telah dibuat. Dalam akuntansi terdapat standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan Laporan Keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna Laporan Keuangan. Jika tidak ada standar yang dibuat maka para pembuat Laporan Keuangan dapat menyajikan Laporan Keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak

sendiri. Hal seperti ini dapat menimbulkan masalah bagi para pengguna Laporan Keuangan karena akan mengalami kesulitan dalam memahami Laporan Keuangan yang ada. Jika Laporan Keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan membingungkan para pengguna Laporan Keuangan. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia membuat sebuah standar dan pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XVII Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: “BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.”

Sesuai dengan Permendagri No.61 maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas yang statusnya sudah menjadi

BLUD adalah Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Standar pelaporan dibuat agar Laporan Keuangan Puskesmas dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Dari penjelasan di atas mengenai Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas, Laporan Keuangan Puskesmas dan permasalahannya maka penelitian ini akan membahas tentang “*Analisis Penerapan PSAK NO.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta*”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Penelitian yang mengevaluasi Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun

penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa unsur yang menyangkut pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Variabel Penelitian

Variabel pokok pada penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen Laporan Keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK No.1.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik yang ditemukan oleh Miles & Huberman. Menurut buku yang ditulis oleh Imam Gunawan yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini dilakukan dengan mencermati Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun Penyajian Laporan Keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan membandingkan antara Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015 dengan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Pada analisis ini dilakukan pembandingan apakah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah disajikan sesuai dengan PSAK No.1 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.1 maka Penyajian Laporan Keuangan tersebut dikatakan

benar. Namun, apabila penyajian Laporan Keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.1 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian. Langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyajian neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Mengidentifikasi pencatatan aset, utang, dan modal pada neraca.
3. Mengidentifikasi pencatatan pendapatan dan beban pada laporan operasional.
4. Mengidentifikasi pencatatan kas masuk dan kas keluar pada laporan arus kas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Profil Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Puskesmas Depok III terletak di Jl. Kompleks Colombo No. 50A Caturtunggal Depok Sleman. Memiliki wilayah kerja 1 desa yaitu Caturtunggal, yang terdiri atas 20 padukuhan, 297 RT dan 95 RW. Luas wilayah Desa Caturtunggal adalah 889.7480 Ha.

Kegiatan utama Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelayanan BP.Umum
2. Pelayanan BP.Gigi
3. Pelayanan KIA
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Psikologi
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Konsultasi Sanitasi

Batas wilayah kerja menurut 4 penjurur mata angin adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Condong Catur

Selatan : Kabupaten Bantul

Barat : Kecamatan Mlati

Timur : Desa Maguwoharjo

Jarak pusat pemerintahan Kota Depok dengan:

Desa : 3Km

Kabupaten : 12Km

Provinsi : 13Km

Jumlah penduduk dan kepala keluarga di wilayah kerja Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

Jumlah KK : 20.129 KK

Jumlah Penduduk : 68.375 Jiwa

Jumlah Laki-Laki : 35.500 Jiwa

Jumlah Perempuan : 20.129 Jiwa

Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Menurut Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, setiap BLUD diwajibkan membuat Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh

asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD harus menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Untuk melakukan perbandingan apakah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah disajikan sesuai dengan PSAK No.1 atau masih perlu dilakukan penyesuaian dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1

NO	ASPEK	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA		PSAK NO.1	SESUAI/TIDAK SESUAI
1	NERACA	Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan keuangan.	Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan keuangan. Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos, yaitu aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang, kas dan setara kas, aset yang dimiliki untuk dijual, utang dagang, kewajiban derivatif, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kas, serta modal saham.	Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos, yaitu aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang, kas dan setara kas, aset yang dimiliki untuk dijual, utang dagang, kewajiban derivatif, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kas, serta modal saham.	35,29% SESUAI
2	LAPORAN OPERASIONAL	Laporan Operasional pada laporan keuangan Puskesmas Depok III Yogyakarta berupa Laporan Operasional. Di dalam laporan operasional juga sudah menyajikan pendapatan, biaya, dan total surplus atau defisit Puskesmas.	Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian pos-pos pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan vektor bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi, dan total laba rugi.	Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian pos-pos pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan vektor bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi, dan total laba rugi.	60% SESUAI
3	LAPORAN ARUS KAS	Arus kas yang disajikan telah mampu menghasilkan informasi tentang kas dan setara kas.	Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan penggunaannya.	Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan penggunaannya.	100% SESUAI
4	CALK	Catatan atas laporan keuangan yang disajikan Puskesmas sudah mencakup dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang diwajibkan SAK, serta memberikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.	Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang diwajibkan SAK yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan serta memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.	Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang diwajibkan SAK yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan serta memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.	100% SESUAI

Berdasarkan Tabel 1. di atas dipahami bahwa Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta secara umum sudah menerapkan PSAK No.1 mulai dari penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara umum sudah sesuai seperti yang disyaratkan pada PSAK No.1 dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut PSAK No.1 format Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari; Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta ada pergantian nama dimana Laporan Laba Rugi Komprehensif berganti nama menjadi Laporan Operasional, hal ini dikarenakan Puskesmas bukan merupakan organisasi yang bersifat nirlaba dan tidak mengenal sistem laba rugi. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas pada Penyajian Laporan Keuangan di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta tidak dibuat, karena seluruh ekuitas yang dimiliki Puskesmas merupakan milik pemerintahan daerah.

Pembahasan

1. Penyajian Neraca

Menurut PSAK No.1 entitas harus menyajikan aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam SAK khusus.

Pada tabel 1. telah di tunjukkan bahwa Neraca yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 35,29% dengan PSAK No.1. Menurut PSAK No.1 Neraca harus menyajikan 17 akun, seperti: aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan, utang dagang, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas pajak sesuai PSAK No.58, kepentingan non pengendali, dan modal saham. Pada Neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015 hanya terdapat 6 akun yaitu: aset tetap, aset keuangan, persediaan, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan, dan utang dagang. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Neraca adalah $6/17 \times 100\% = 35,29\%$.

2. Penyajian Laporan Operasional

Pada Penyajian Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta terdapat pergantian nama Laporan Laba Rugi menjadi Laporan Operasional dikarenakan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta adalah organisasi milik pemerintah yang tidak mengenal sistem laba rugi. Penyajian Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah mampu menyajikan informasi berupa jumlah pendapatan dan biaya serta dapat menunjukkan total surplus atau defisit dalam satu periode.

Pada tabel 1. telah di tunjukkan bahwa Laporan Operasional yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 60% dengan PSAK No.1. Menurut PSAK No.1 Laporan Operasional harus menyajikan 5 akun, seperti: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi, beban pajak, jumlah surplus atau defisit. Pada Laporan Operasional yang disajikan dalam Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015 hanya terdapat tiga akun yaitu: pendapatan, biaya keuangan, dan jumlah surplus atau defisit. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Laporan Operasional adalah $\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$.

3. Penyajian Laporan Arus Kas

Pada tabel 1. telah di tunjukkan bahwa Laporan Arus Kas yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 100% dengan PSAK No.1 karena menurut PSAK No.1 Laporan Arus Kas harus dapat memberikan dasar bagi pengguna Laporan Keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Pada Penyajian Laporan Arus Kas Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, laporan ini telah mampu menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar serta mampu menunjukkan jumlah saldo kas dan setara kas. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Laporan Arus Kas adalah 100% karena sudah memenuhi persyaratan yang ada pada PSAK No.1 bahkan lebih lengkap dari yang disyaratkan PSAK No.1 dengan menunjukkan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi sesuai yang disyaratkan oleh PSAK No.2.

4. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Pada tabel 1. telah di tunjukkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 100% karena mampu menyajikan

informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, mampu mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di dalam bagian Laporan Keuangan, dan memberikan informasi yang belum disajikan di Laporan Keuangan tapi informasi tersebut relevan untuk memahami Laporan Keuangan. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Catatan atas Laporan Keuangan adalah 100% karena sudah memenuhi persyaratan yang ada pada PSAK No.1.

5. Penerapan PSAK No.1 dalam Pelaporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

BLUD sebagai instansi yang berada di lingkungan pemerintah diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk menciptakan manajemen bisnis yang sehat. Maka standar akuntansi yang mungkin digunakan dalam Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta adalah PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri No.61 Tahun 2007 dan

Laporan Keuangan BLUD menjadi dapat lebih mudah dipahami dan memiliki relevansi.

Dengan dipergunakannya PSAK No.1 pada pelaporan keuangan BLUD maka dapat diperoleh keuntungan antara lain:

1. Meningkatnya daya banding, relevansi, serta lebih mudah dipahami para pemakai Laporan Keuangan.
2. Meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Telah memenuhi apa yang telah diatur oleh Permendagri No.61 Tahun 2007.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah mampu menerapkan PSAK No.1 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1 yaitu tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas karena semua ekuitas yang ada pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta merupakan milik Pemda setempat. Ada perbedaan nama Laporan Laba Rugi Komprehensif menjadi Laporan

Operasional, meskipun terdapat perbedaan nama tapi informasi yang disajikan Laporan Operasional secara umum sudah menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan total surplus atau defisit Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyajian Neraca Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 35,29%.
- b. Penyajian Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 60%.
- c. Penyajian Laporan Arus Kas Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 100%.
- d. Penyajian informasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 100%.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dapat menjaga kualitas dan relevansi dalam pembuatan Laporan Keuangan.

2. Beberapa praktik akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK No.1 diharapkan terus konsisten supaya informasi yang dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi.
3. Mencantumkan informasi yang lengkap dalam penyusutan setiap pos aset tetap di Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlunya pembuatan standar atau pedoman dari pemerintah yang mengatur tentang prosedur penyusunan RBA di BLUD.
5. Jika ada standar atau peraturan baru yang berlaku tentang penyajian laporan keuangan, Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta diharapkan segera memperbaiki dan memperbarui cara penyajian laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: Alfabeta.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Marshallino. (2015). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk: Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009). 2009. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
- Ronny Hendrawan. (2011). "Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus di RSUD Kota Semarang)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rulam Ahmadi. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sofyan Harahap. (2006). *Analisis Kritis Laporan Keuangan Edisi 1-5*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Siti Hawa dan Siti Khairani. (2013). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT.Jamsostek (Persero). *Jurnal*. STIE MDP.
- Siti Rahmi Amir dan Treesje Runtu. (2014). "Analisis Penerapan PSAK tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT.Bank Sulut TBK (Persero)". *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Wahyu Repi, Grace B. Mogi-Nangoi, Heince Mokus. (2015). "Analisis Penerapan PSAK No.45 (Revisi 2011) Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada STIKES Muhammadiyah Manado". *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.